

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI TAIWAN

Keberhasilan yang dicapai sebuah negara merupakan hasil dari sebuah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh *decision maker* dari sebuah negara terhadap negara lain atau unit dan lembaga internasional yang digunakan untuk meraih tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional. Teori politik luar negeri adalah teori yang menjelaskan pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh suatu negara sewaktu berjuang mendapatkan kepentingannya (Mas'ood, 1990, p. 43).

Dalam kasus Taiwan diatas tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan pengambilan kebijakan luar negeri negara tersebut. Untuk menggapai tujuan nasional itu mereka lakukan dengan menimbang secara rasional aspek dalam kancah politik Internasional. Pada pendekatan ini, respon terhadap sesuatu yang dilakukan oleh negara lain dianggap sebagai politik luar negeri yang dikeluarkan oleh kebijakan suatu negara (William D. Coplin and M. Marbun, 2003).

A. Faktor Situasi Politik Domestik

William D Coplin dalam teorinya menyatakan, “Bahwa politik dalam negeri adalah seperangkat determinan yang bekerja dalam politik luar negeri sebuah negara”. Meskipun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor lain juga dapat bekerja didalamnya. Kita bisa mencontohkan sikap pengambil keputusan atau struktur konsep internasional. Menurut teori diatas

didukung oleh argumentasi David Easton tentang sistem politik. Menurutnya, “Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara” atau dalam bahasan Easton disebut sebagai *input*. *Input* itu yang kemudian akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sama halnya dengan kasus politik domestik Taiwan, sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dilembaga politik. (Budiardjo, 2008, p. 77)

Taiwan merupakan contoh pembangunan demokrasi yang sukses, yang banyak dijadikan contoh oleh Negara-negara lain di Asia, khususnya Asia Timur. Dengan status quo nya, Taiwan terus memperjuangkan untuk memisahkan diri dari China daratan. Selama 60 tahun membangun demokrasi sejak perang saudara. Demokrasi di Taiwan merupakan perjuangan melalui sejarah panjang dengan hambatan-hambatan yang besar. Sekarang Taiwan sukses menjalankan demokrasinya, dan juga merupakan 4 kekuatan ekonomi di Asia timur atau yang sering disebut macan Asia, Taiwan didaulat sebagai salah satu negara importer, eksportir, dan investor asing langsung terbesar di dunia. Taiwan memiliki *ideology* yang disebut dengan San Min Chu I, dengan 3 prinsip dasar yaitu, keadilan sosial, kebangsaan, dan demokrasi. Taiwan yang sukses dengan demokrasinya bangkit sebagai negara maju dengan konsisten berpegang pada ideologi Negara. (Agustinee, 2012)

Kuatnya figur Kepemimpinan Chiang Kai-shek sebagai pemimpin sekaligus tokoh pembaharu masyarakat, dan juga Sebagai “Arsitek” Keberhasilan Pembangunan Taiwan, telah berhasil meletakkan dasar pembangunan sekaligus memastikan bahwa tahapan yang

dicapai sesuai dengan perencanaan. Salah satu kebijakan dasarnya adalah dibuatnya sebuah model yang dapat menyalurkan semangat kewirausahaan rakyatnya.

Kebijakan berikutnya adalah memberi peran kepada pelaku industri menengah untuk bekerja sama dengan institusi internasional untuk dikembangkan secara menyebar dan merata ke seluruh wilayah Taiwan. Membangun jalur jalan kereta api dan jalan bebas hambatan, meningkatkan fasilitas kesehatan, memimpin gerakan anti narkotik, menciptakan aturan untuk menstabilitas harga, penegakan hukum beserta sangsi-sangsi-sangsi, penataan industri pertanian serta melakukan gerakan hidup baru melalui semangat *Confucian*.

Paham *Confucian*¹ yang secara umum terjadi pula pada masyarakat di negara Asia Timur lainnya seperti Hongkong, Singapura, Korea Selatan dan Jepang, yang ternyata berdampak kepada tradisi dan kepercayaan bahwa setiap kesepakatan yang telah dihasilkan pantang untuk dikritisi kembali, walaupun mendesak disalurkan melalui mekanisme yang tertutup sehingga tidak memberikan keguncangan kepada stabilitas pembangunan. Kepatuhan rakyatnya untuk mentaati sebuah program sangat tinggi dan walaupun terjadi perbedaan maka, standar kebenarannya dipercayakan

¹*Confucian* bukanlah agama yang menekankan pada kehidupan di akherat melainkan merupakan aturan etika dan tingkah laku, yang dimaksudkan sebagai pedoman terhadap pola hubungan antar umat manusia. Hubungan yang teramat penting adalah bersifat hirarkis, yakni antara generasi, dalam lingkup keluarga ataupun antara penguasa dan rakyat jelata. Pola dalam *Confucian* ini akan memperlihatkan sikap patuh, loyalitas dan rasa hormat. Serta memberikan teladan moral yang baik dalam masyarakat perihal tujuan dan cita-cita bersama.

kepada kearifan maupun pengalaman tokoh seniornya yang sangat dihormati.

Menurut Cummings, kesuksesan Taiwan dapat dikaji dari aspek adanya pola hubungan yang kuat antara sektor pemerintah dengan perusahaan swasta yang menggunakan semangat *Confucian* sebagai tradisi. Dimana pola hubungan tersebut sangat kuat di tiga negara Asia Timur yaitu : Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut gagasan paham *Confucian*, pemerintah tidak secara langsung mengatur masyarakat, juga bukan dari dan oleh masyarakat. Fungsi pemerintah adalah melaksanakan secara jitu semua kebijakan yang telah dirumuskan secara tepat, dimana standar ketepatannya ditentukan oleh kearifan maupun pengalaman pemimpin pemerintahan senior. Bentuk pemerintahan yang cocok untuk tugas ini adalah pemerintahan yang bersifat otoriter dengan sistem birokrasi yang terpusat. Karakteristik pokok dari figure kepemimpinan di ketiga negara Asia Timur ini cenderung kuat seperti apa yang dikatakan Cummings : (Cummings, 1984)

“mereka mampu merumuskan tujuan kebijakan tanpa di pengaruhi oleh kelompok tertentu, mereka mampu mengubah perilaku kelompok ataupun kelas tertentu dalam masyarakat, dan bahkan mereka mampu mengubah struktur masyarakatnya.”

Kemudian pada tahun 1953 melalui tahapan strategi pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan (*The first in series of four-years economic plans*) secara bertahap Taiwan melakukan transformasi ekonomi pertanian dari yang sebelumnya gula dan beras sebagai komoditas andalan beralih kepada jenis industri yang beragam dan ekonomi komersil. Sebaik apapun penanganan sektor industri tidak bisa terlepas dari perlunya pembangunan sektor infrastruktur, begitupun

dengan konsep pembangunan “*Global Village*” di Taiwan, dimana telah dirancang dalam tahapan pembangunan yang terpadu dimana pembangunan sosial ekonomi masyarakat pedesaan (pendidikan, pertanian dan sektor usaha kecil dan menengah) harus digabungkan oleh pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke perdesaan sehingga akan mampu menarik investasi, berkembangnya industri kecil serta hilangnya disparitas hasil pembangunan sebagai akibat dari tersentralnya pembangunan yang hanya bertumpu pada satu wilayah.

Keberhasilan ekonomi Taiwan memberi peluang bagi penduduknya bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, edukasi dan juga vokasi. Setelah kembali ke Taiwan, mereka yang banyak dipengaruhi oleh nilai kebebasan individu dan masyarakat pluralis dari luar tidak mungkin bertahan di bawah rezim autoritarian. Oleh karena itu, secara perlahan masyarakat Taiwan hidup di bawah pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan kata lain, sistem politik Taiwan mengadopsi nilai demokrasi dan liberalisme dari negara-negara Barat. Pada awalnya, pemerintahan Taiwan berada di bawah dominasi partai Kuomintang (KMT) dengan kepemimpinan Chiang Kai Shek hingga Lee Teng Hui. Di mana, dominasi partai KMT saat itu menginginkan kemerdekaan Taiwan. setelah itu, pemerintahan Taiwan dipimpin oleh Chen Shui Bian dari partai oposisi DPP, dengan tetap menginginkan kemerdekaan.(Lau., 2002)

Strategi politik Taiwan kini di bagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menginginkan reunifikasi Taiwan dengan RRC dipimpin oleh partai KMT dan kelompok yang menginginkan kemerdekaan Taiwan dipimpin oleh partai DPP. Namun, antara Taiwan dan RRC masih sama-sama mempertahankan status-quo, di mana Taiwan tidak merdeka secara formal.

Dinamika dan situasi politik Taiwan ini kemudian turut menjadi determinan penentuan keputusan politik luar negeri Taiwan. Dengan tingkat perekonomian yang kuat, Taiwan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan sesama negara demokratis yang lain cenderung melalui jalur ekonomi dengan tetap ditunggangi oleh alasan politik untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan. Namun, hubungan diplomatik yang dijalankan oleh Taiwan tersebut bersifat tidak resmi sebagai dampak dari tekanan pemerintah RRC, dan Taiwan tetap saja tidak bisa melebarkan sayapnya karena berada di bawah kedaulatan RRC yang disertai dengan berbagai ancaman penyerangan jika Taiwan melawan pemerintah.

B. Faktor Ekonomi dan Militer Domestik

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh William D Coplin dalam proses pengambilan kebijakan, yang dimaksudkan sebagai determinan dari faktor ekonomi dan militer domestik adalah “suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya”. Didalamnya termasuk juga aspek geografis yang selalu melatar belakangi pertimbangan keamanan dan pertahanan. Dalam aspek ini Taiwan sudah tidak perlu dilakukan lagi kekuatan ekonominya yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Dengan kemampuan inilah Taiwan menjadi percaya diri dan menjadikan perangkat ekonomi yang dibangunnya menjadi alat yang besar untuk menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat dunia. Dan tujuan ini sudah berhasil dicapai oleh Taiwan dengan mendapatkan penobatan menjadi satu dari Macan Asia dengan salah satu ekonomi terbesar di Asia sehingga dapat mempermudah Taiwan dalam menjalankan misi lain yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya.

Program strategi pembangunan ekonomi Taiwan yang fundamental sudah berlangsung sejak tahun 1952 hingga tahun 1999, periode ini merupakan masa peralihan dari masyarakat yang berbasis agrikultur (meliputi Persawahan, Peternakan, dan Kehutanan) menjadi masyarakat yang berbasis industri.

Perencanaan program strategi pembangunan ini dapat dibagi menjadi tiga fase dimana setiap fasenya pemerintah memformulasikan perencanaan ekonomi dan politik yang disesuaikan dengan tren kebutuhan domestik dan internasional bagi kesejahteraan rakyatnya.

1. Sasaran dan tahapan pembangunan

Dari beberapa sumber data yang dianalisa berikut ini adalah pokok-pokok strategi pembangun ekonomi Taiwan dari tahun 1952 sampai tahun 1999 yang telah dirangkum berdasarkan signifikansi koreksi terhadap pola strategi pembangunan sehingga terbentuk masyarakat “*Global Village*” yaitu: strategi, sasaran dan pencapaian pembangunan yang terdiri : (Office, 2003)

(Fase I : 1952-1962) : Membangun sumber daya dan infrastruktur dasar sebagai titik tolak tahapan selanjutnya, meliputi:

- Dideklarasinya situasi “*Emergency Degree*” yaitu adanya ancaman dari ideologi Komunis China dan keberlangsungan proses demokratisasi.
- Perbaikan *Human Capital* melalui pendidikan terpadu di semua tingkatan.
- Membangun sosial ekonomi masyarakat pedesaan di sektor pertanian melalui kebijakan *Land Reform (1951)*.
- Menjadikan (*SMEs: Small and Medium-sized Enterprises*) sebagai pilar kebangkitan kekuatan

industrialisasi nasional yang menyebar ke seluruh wilayah.

- Dideklarasinya pelaksanaan empat tahun pertama pelaksanaan *Economic Development Plan* : Fokus pada rekonstruksi pertanian dan peningkatan produksi beras, pupuk, dan *hydro elektrik power* (1953-1956).

(Fase II : 1963-1980) : Masa peralihan dari agribisnis menjadi industri dan jasa padat modal dan investasi, meliputi:

- Dideklarasinya 10 proyek utama bidang infrastruktur meliputi : 6 infrastruktur bidang transport, 3 infrastruktur bidang industri dan 1 infrastruktur bidang *Power Site* dengan total anggaran NT\$ 300 Milyar.
- *Set up (ITRI: Industrial Technology Research Institute)* (1974)
- *Set up Scientific Technology Development Project* (1979)
- *Set up Institute for Information Industry* (1979)

(Fase III: 1982-1999) : Perubahan struktur industri menjadi industri yang berbasis *Information Technology Industries* dan penguasaan pasar regional maupun internasional :

- *Set up Hsinchu Science Park* (1980).
- Dideklarasinya berakhirnya masa “*Emergency Degree*”, melakukan proses demokratisasi yang lebih luas di Taiwan serta membina hubungan dengan China yang lebih baik.
- Pelaksanaan rencana besar kesiapan menghadapi liberalisasi dan globalisasi ekonomi dan proses swastanisasi berbagai sektor usaha.

Berikut ini adalah uraian lengkap dari seri rencana tahapan pembangunan yang dijalankan sebagai acuan pembangunan :

1. 1953 – 1956 : *The First Four-years Economic Development Plan*
Konsentrasi pada Rekonstruksi dan Peningkatan produksi beras, Pupuk, *Hydro Elektronik Power*. Berhasil menaikkan GNP 37 persen dan 17 persen pendapatan perkapita.
2. 1957 – 1960 : *The Second Four-years Economic Development Plan*
Konsentrasi pada Substitusi Import, Industri dan agrikultur meningkat secara signifikan sehingga menyumbang kenaikan GNP 31 persen dan 13 persen pendapatan perkapita.
3. 1961 – 1964 : *The Third Four-years Economic Development Plan*
Konsentrasi pada pemberian insentif pada buruh industri ekspor, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan energi, kontribusi industri kepada pertumbuhan agrikultur, eksplorasi dan pengembangan terhadap kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber daya alam
4. 1965 – 1968 : *The Fourth Four-years Economic Development Plan*
Konsentrasi pada penganggulungan dampak-dampak yang ditimbulkan atas terjadinya pembatasan bantuan dari Luar Negeri (Amerika Serikat dan Jepang) menuju kemandirian Negara.
5. 1969 – 1972 : *The Fifth Four-years Economic Development Plan*
Konsentrasi pada peningkatan daya saing produk industri unggulan yang telah memberi pendapatan signifikan seperti : Industri kimia dan jasa penampungan pelabuhan peti kemas. Di Era ini telah

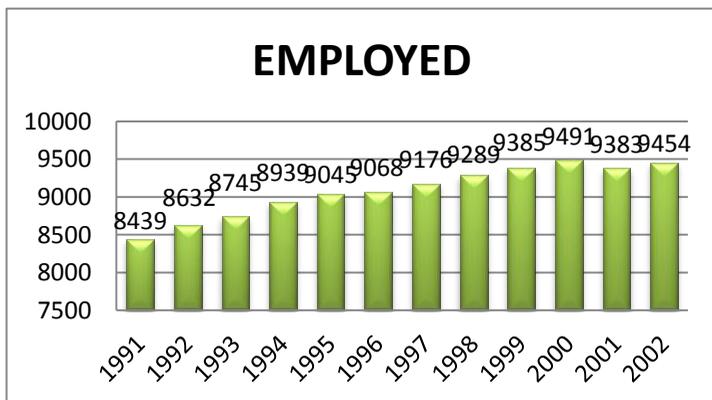
berhasil menaikkan GNP 46 persen dan pendapatan perkapita 55 persen.

6. 1973 – 1976 : *The Sixth Four-years Economic Development Plan*

Didalam perjalanannya karena terjadi resesi ekonomi dan hanya mampu menaikkan GNP 19 persen saja sehingga periode ini diganti dengan tahapan *The Six-year plan* (1976-1981) dengan konsentrasi pada ekspansi industri dasar, penyelesaian dan pengembangan 10 *Major infrastructure project*.

Keberhasilan Taiwan pun dapat dibuktikan ketika terjadinya krisis ekonomi besar-besaran dalam pasar Asia, namun krisis finansial Asia tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi Taiwan yang tumbuh sekitar 5% per tahun, dengan nyaris seluruh penduduknya bekerja dan inflasi rendah. Krisis tahun 1997 tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian Taiwan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Tingkat perekonomian Taiwan dilihat dari nilai GDPnya pada tahun 2006 mengalami peningkatan di atas 4% dan tingkat pengangguran kurang dari 4%.

Gambar 4.1 Grafik pertumbuhan tenaga kerja



Sumber : Asian Development Bank

Gambar 4.2 Grafik pertumbuhan perdagangan ekspor luar negeri



Sumber: Asian Development Bank

C. Faktor Konteks Internasional

Terdapat tiga unsur utama dalam membahas dampak konteks internasional terhadap adanya suatu politik luar negeri sebuah negara, yaitu: geografis, ekonomis, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terbagi atas lokasi yang didudukinya, dalam hubungannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu; dan juga hubungan-hubungan politik serta ekonomi diantara negara itu dengan negara dari wilayah lain (William D. Coplin and M. Marbun, 2003, p. 166).

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan kementerian urusan perekonomian (*MOEA the Ministry of Economic Affairs*) dalam mekanisme menuju kesetaraan terhadap negara sentral, aliansi internasional yang dilakukan Taiwan pada awal pertengahan 1998 menunjukkan peningkatan sebesar 65 persen pada sektor investasi asing yaitu sejumlah 163.3 milyar \$ NT (*Net Taiwan*). Untuk kapitalisasi yang bersifat investasi

langsung modal asing mayoritas terkonsentrasi pada industri manufaktur elektronik, produk teknologi informasi, perbankan, bisnis ritel dan jasa.(office, 2005)

Fenomena lainnya adalah berhasilnya industri skala kecil dan menengah (*SMEs : small and medium-sized enterprises*) yang mampu bertahan dari hantaman krisis keuangan juga dikarenakan telah terjalinnya hubungan kerjasama bilateral maupun regional dengan negara lain yang dilakukan juga oleh skala industri yang sama.

Pada tahun 1993 saja terdapat 700.000 industri skala kecil dan menengah yang tersebar merata di seluruh wilayah perdesaan dan ternyata menghasilkan 98 persen lebih dari total bisnis Taiwan dan 65 persen total ekspor Taiwan berasal dari industri skala kecil dan menengah yang juga telah menyumbangkan 55 persen dari GNP serta menyerap 70 persen dari seluruh tenaga kerja di seluruh negeri. (Supiyo, 1992)

Signifikannya peran Jepang sebagai negara sentral juga mendominasi pembangunan ekonomi di Taiwan. Sepanjang tahun 1997 hingga tahun 1999 saja nilai ekspor Jepang ke Taiwan tetap lebih besar dibandingkan dengan nilai impor dari Taiwan, atas dasar ketimpangan itu mendorong Taiwan untuk bergabung dengan WTO untuk dapat mengurangi defisit perdagangan dengan Jepang. Berikut ini data lengkapnya.

Dominasi surplus perdagangan Jepang terhadap Taiwan ini “ditangkap” oleh Amerika Serikat sebagai sinyal negatif karena bagi Amerika Serikat kawasan Asia Timur merupakan kawasan terlarang bagi munculnya dominasi ekonomi dan pengaruh politik Cina tetapi tidak juga untuk Jepang karena dari sisi ekonomi Jepang merupakan ancaman terkuat terhadap produk-produk Amerika Serikat untuk itulah Amerika Serikat sekuat

mungkin dapat berperan lebih banyak terhadap perekonomian Taiwan.(Lijun, 2001)

Penguasaan teknologi dan industrialisasi bila dilihat dari kemunculannya jelas bahwa Jepang lebih dahulu mengalami kemajuan dengan demikian dampak bagi Taiwan sebagai negara kolonialnya adalah Jepang mengajarkan betul kepada Taiwan untuk menjadi negara yang mampu membuat produk yang dapat memasok kebutuhan industri Jepang. Dengan demikian pada akhirnya nanti produk Taiwan bukanlah kompetitor tetapi komplemen bagi Jepang. Strategi industrialisasi ini cukup sukses dijalankan, sehingga sektor industri kecil dan menengah yang ada di Taiwan terdorong untuk lebih maju lagi baik dari segi kualitas produk yang dihasilkannya maupun dari skala investasi yang dimilikinya.

Untuk bisa menganalisa faktor keberhasilan proses transformasi industrialisasi di Taiwan tidak bisa lepas dari dua hal yaitu solidnya infrastruktur industri dan kuatnya integrasi vertikal pada kapasitas tata kelola dibidang informasi teknologi dengan industri elektronik. Hanya dalam waktu 20 tahun, keseriusan kepada pembangunan industri sektor informasi teknologi telah menjadikan kekuatan pengendali pembangunan ekonomi di Taiwan. Hasil ini tercapai berkat faktor tingginya kualitas sumber daya, jaringan pemasok yang terintegrasi, adanya sistem pembagian tata kerja internasional, sangat cepat dan fleksibelnya pengembangan jaringan pemasok. Telah menghantarkan Taiwan menjadi jaringan integral global dalam rantai pemasok kebutuhan industri teknologi.

Berikut ini adalah data lengkapnya :

Tabel 4.1

Penguasaan produk hasil manufaktur Taiwan
 Sebagai pemasok global terbesar (Data tahun 2003)

Nomor 1 Dunia	Nomor 2 Dunia	Nomor 3 Dunia
1. Notebook PCs	1. IC Design	1. DRAM
2. Wireles LAN	2. Digital Still Cameras	2. Flat Panel Display
3. xDSL Modems	3. Polyester Filament	3. Nylon Fiber
4. Cable Modem	4. Polyester Staple Fiber	4. Screws and Nuts
5. Foundry	5. Purifier	
6. IC Packing	6. Terephtalic Acid	
7. SOHO Routers	6. Polyurethanes Synthetic Leather	
8. LCD Monitor		
9. Optical Disk Drive		
10. Motherboard		
11. Recordable Optical Disk		

Sumber: 2003-2004 Global Competitiveness Report oleh WEF: World Economic Forum

Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Brown University, USA. Dari 198 negara yang disurvei, Taiwan menempati ranking pertama sebagai negara yang sukses menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi (*E-Government Performance*). (Office, Taiwan at a Glance, 2006)

Negara sentral lainnya adalah Amerika, tujuan strategis jangka panjang yang hendak dicapainya adalah

untuk menahan pengaruh komunisme dari Cina dan Korea Utara. Dengan demikian Taiwan akan dapat dijadikan perpanjangan kekuatan militer Amerika Serikat yaitu dengan ditempatkannya tentara Amerika Serikat beserta kekuatan dan fasilitasnya di wilayah Taiwan tersebut.

Sadar akan pentingnya posisi tersebut bagi Amerika Serikat, pemerintah Taiwan memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan wilayahnya yang sedang membutuhkan pendanaan, maka dibuatlah kerjasama dalam bentuk (*ECA: Economic Cooperation Administration*) and (*JCRR: Joint Commission on Rural Reconstruction*) yaitu sebuah lembaga resmi bentukan kedua negara yang berfungsi untuk menerima bantuan dari Dewan Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat (CUSA) sebagai kepanjangan dari USAID. Hasilnya program upaya rekonstruksi wilayah perdesaan dapat berjalan dengan sukses. (Berman, 1992)

Pasca meletusnya perang Korea kekhawatiran munculnya kekuasaan komunis di wilayah Asia Timur telah mengundang Amerika Serikat untuk mengambil kebijakan politik pembendungan pengaruh ideologis komunis salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Taiwan baik sektor ekonomi maupun penguatan sektor militer.

Dari tahun 1949-1967 saja bantuan Amerika Serikat yang telah diberikan kepada Taiwan untuk rekonstruksi ekonomi perdesaan sebesar 4,1 juta dollar AS. Besarnya arus bantuan luar negeri ke Asia Timur termasuk semua pinjaman lunak antar pemerintah berupa hibah, pinjaman lunak, bantuan teknis, dan sebagainya yang termasuk bilateral maupun multilateral setelah memasuki dasawarsa 1970-an jamlahnya semakin terbatas namun yang penting dicatat bahwa arus bantuan

asing telah memainkan peran yang luar biasa besar pada saat awal pembangunan kawasan tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri setiap tahunnya pada awal dasawarsa 1950-an memberi bantuan 90 juta dollar AS yang dapat membiayai sekitar 40 persen dari impor barang dan jasa Taiwan, begitupun halnya bantuan yang dikucurkan oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan sebelum berlangsungnya perang Korea naik sekitar 60 juta dollar AS pada tahun 1950-an sehingga totalnya hamper mencapai 200 juta dollar AS.

Kemudian pada dasawarsa 1970-an tahapan ketiga arus bantuan luar negeri dikucurkan, pada saat itu banyak terjadi debat tentang syarat-syarat pemberian kredit hingga digantikannya bantuan luar negeri bilateral menjadi bantuan luar negeri multilateral oleh hampir semua negara donor bilateral. Mulai sejak itulah pemberian bantuan diorganisasi oleh lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Asia, dana internasional bagi pembangunan sektor pertanian (*IFAD*), *OPEC* dan dana Arab digabungkan ke dalam Bank Dunia yang secara riil juga mengalami pertumbuhan secara pesat pada dasawarsa 1970-an.

Besarnya angka bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada Taiwan selain untuk tujuan politis strategis juga diarahkan kepada tujuan kepentingan ekonomi Amerika Serikat secara global. Adapun wujud pelaksanaannya dijalankan dengan konsep penanaman modal asing di Taiwan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang total arus modal asing baik terdiri dari hibah antar pemerintah maupun yang dikonversikan dalam bentuk hutang jangka menengah dan jangka panjang selama dasawarsa 1970-an.

Posisi geo-politik dan ekonomi Taiwan terhadap keamanan dan stabilitas wilayah Asia Timur memiliki arti

penting bagi Amerika Serikat dan Jepang. Penyebaran pengaruh hegemoni Amerika Serikat di kawasan ini menjadi pertimbangan utama Amerika Serikat sehingga mau melakukan apa saja demi tercapainya misi tersebut.

Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Taiwan tiap 3 tahun

LONG-TERM TRENDS 3-year averages			
	2011-13	2014-16	2017-19
Population (million):	23.3	23.5	23.7
GDP (USD bn):	499	536	640
GDP per capita (USD):	21,423	22,820	27,035
GDP growth (%):	2.7	3.6	3.5
Fiscal Balance (% of GDP):	-2.0	-1.6	-1.0
Public Debt (% of GDP):	33.8	35.7	35.0
Inflation (%):	1.4	1.1	1.7
Current Account (% of GDP):	9.6	12.6	11.1
External Debt (% of GDP):	28.2	34.5	32.9

Sumber : *Economic Forecast from the World's Leading Economist*